



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya. Dalam pengelolaannya di Tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi (Editor)

Ahyar, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI))

Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)

Marulak Pardede, S.H., M.H. (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)

Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Dr. Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar)

Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.

Dra. Evy Djuniarti, M.H.

Ibnu Prasetyo, S.H.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copy Editor)

Lindung Budi Mulyawan, S.H.

B. Lora Christyanti, S.IP.

Maria Lusyana Br. Ginting, S.A.P.

Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.

Amirah Balqis, S.H.

Teknologi dan Sistem Informasi

Machyudhie, S.T.

Mochamad Arip, S.Kom

Harysandy Permana, S.Kom.

Agus Priyatna, S.Kom.

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Dr. Farhana S.H., M.A., M.Pd.
Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta
5. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesias
7. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon(021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon(021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
 Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (<i>Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law</i>)	 1 -12
Edward Omar Sharif Hiariej	
 Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat SARS-COV-2 (<i>Legal Immunity in Disaster Management non-Natural Due to SARS-COV-2</i>)	 13-22
Erwin Ubwarin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Patty, Anna Maria Salamor	
 Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatandan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (<i>Legal Aspects of Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid-19 Pandemic</i>) ...	 23-44
Marulak Pardede	
 Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19 (<i>The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19</i>)	 45-58
Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari	
 Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis (<i>Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts</i>)	 59-74
Muhar Junef, Moh. Husain	
 Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia (<i>The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs in Indonesia</i>)	 75-90
Eko Noer Kristiyanto	

Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (<i>Urgency of Formation Regulation Gration, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation</i>)	91-108
Sujatmiko, Willy Wibowo	

Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor Industri Ekonomi Digital (E-Commerce) di Indonesia (<i>Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The Digital Economic Industry (E-Commerce) Sector in Indonesia</i>)	109-122
Adis Nur Hayati	

Pengadopsian Mekanisme <i>Fast-Track Legislation</i> dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden (<i>Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power</i>).....	123-140
Ibnu Sina Chandranegara	

Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (<i>Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners</i>).....	141-160
Insan Firdaus	

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM), Kementerian Hukum dan HAM R.I. bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) kembali menerbitkan Volume 21 Nomor 1 Maret 2021. Pada penerbitan Volume 21 Nomor 1 yang seharusnya diterbitkan di Maret, Alhamdulillah di bulan Februari 2021 sudah dapat diterbitkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang cukup baik antara pengelola, penulis dan reviewer.

Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Tahun 2021 ini memuat 10 (Sepuluh) tulisan dari akademisi, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta dari institusi/lembaga Penelitian yang ada di Indonesia. Sebagian besar tema yang kami angkat adalah mengenai Covid-19, diantaranya yakni: *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak, Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2, Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen atas Penanggulangan Covid-19, Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19, Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis, Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia; Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi; Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia, Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden; dan Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyawarakan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyawarakan.*

Penerbitan beberapa tulisan di atas semoga dapat bermanfaat bagi pembaca setia Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Atas terbitnya Jurnal Penelitian Hukum D Jure ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis yang masih mempercayakan Jurnal Penelitian Hukum De Jure sebagai tempat mempublikasikan hasil penelitiannya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM atas kerjasamanya dalam penerbitan Jurnal Peneitian Hukum De Jure. Kepada para *Reviewer* juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas semua masukannya terhadap tulisan-tulisan yang kami mintakan untuk di-review.

Redaksi,

Februari 2021

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Edward Omar Sharif Hiariej

Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 1-12

Principles of law have a unique character of being dynamic to reflect contemporary developments. Such character is also evident within the principle 'lex specilis derogat legi generali' that experience theoretical growth. This principle gives rise to 'lex specialis systematis'. There are two known sources in criminal law: general criminal law and special criminal law. One of the earliest examples of special criminal law is tax law which constitutes 'lex specialis systematis'. The research methodology in this article is a literature review as well as analyzing theories relevant to the principle 'lex specialis derogat legi generali'. This study indicates that the tax criminal law meets the criteria as lex specialis sistematis because the address is particular: taxpayers and tax officers. Besides, both the material provisions and the tax criminal law's formal provisions deviate from the KUHP and KUHAP. The suggestions that we can propose to the House of Representatives and the President as legislators are necessary to make fundamental changes to the law on general introductory provisions of taxation by remembering that the tax criminal law is ius singular as administrative law given criminal sanctions.

Keywords: *lex specialis; criminal tax law*

Erwin Ubwarin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Patty, Anna Maria Salamor

Legal Immunity in Disaster Management non-Natural Due to SARS-COV-2

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 13-22

This paper discusses the issue of criminal immunity concerning the handling of Covid-19 by all policymakers is it the Financial System Stability Committee or other policymakers related to Covid-19. The method used in this research is normative juridical. With the statutory approach, the conceptual approach that discusses impunity, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, the material collection technique is a literature study, and the data analysis used is qualitative. The study results found that one of the slow absorptions of disaster funds budget and slow handling is long administrative procedures and policymakers are afraid to take policies because of the threat of death penalty in the criminal act of corruption. Criminal law immunity in article 27 paragraph (2) of Law Number 2 of 2020 does need to be in place to protect policymakers. The nature of impunity is not absolute, so policymakers cannot arbitrarily because there must be good faith in making policies or actions in Covid-19 customers. In conclusion, legal immunity in handling is necessary to protect policymakers, but there must be good faith in policymaking or actions taken. Suggestions need regulations under a law that can explain the meaning of article 27 paragraph (2) of Law Number 2 of 2020.

Keywords: *immunity; criminal; covid-19*

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Marulak Pardede

Legal Aspects of Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid-19 Pandemic

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 23-44

The World Health Organization (WHO) states that more and more variants of the new Coronavirus are being reported globally, which is said to have the potential to be more infectious and resistant to vaccines. However, the WHO has a strong belief that people should be vaccinated as soon as possible. Among Asian countries, Indonesia is the 4th largest contributor to positive cases. The vaccination program is expected to help control and break Corona's chain to prevent this virus outbreak. According to article 9 (1) No. 6 of 2018 of the Law, vaccines are mandatory if you refuse to be sentenced. Meanwhile, Law No. 8/1999 requires drug or vaccine manufacturers that guarantee halal certificates and/or certificates of guarantee of their efficacy. Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. Main research problems: how is the harmonization and synchronization between laws and regulations related to the prevention of covid- 19; and what efforts need to be made to overcome the problems that arise in eradicating the Covid-19 virus? The research methods used are: juridical-normative approach; Data collection techniques are done by literature study. Data analysis techniques: qualitative normative analysis. The results showed that: the enforcement of health quarantine laws may be sued, because of disharmony and dis-synchronization with consumer protection laws. To overcome it is necessary to make efforts to: harmonize legislation; Socialization, transparency of the uses and risks of covid-19 vaccination.

Keywords: *health quarantine law; covid-19; consumers*

**Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli,
Maudy Andreana Lestari**

The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 45-58

The existence of technology that develops so rapidly signifies movement into the digital era proven by the utilization of communication information technology that reaches various aspects of life. In information technology produced a wide range of products that support human activities. As for the utilization of information technology needed protection a juridically. Concerning intellectual property, Indonesia has actually acknowledged its existence to be kept and protected. However, in current pandemic conditions, the necessary adjustments and specific understandings regarding the legal protection of intellectual property as a form of support for the application of information technology. In this study, normative juridical has an analytical perspective. Namely, analysis of the laws and literature assessment did boldly using a data source of the ringing of three legal materials. The results of this research include education and socialization that can affect each intellectual element of innovation. In the period of pandemic and understanding is linked to how the state protects intellectual property that has given to its citizens, accommodated with support from the government in the form of information system updates, regulatory adjustments and the provision of more attention to inventors The existence of intellectual property registration system in the form of online as an effort to maximize services for the public toward the protection of intellectual property in the use of information technology during the pandemic.

Keywords: *covid-19; legal protection; intellectual property; information technology*

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Muhar Junef, Moh. Husain

***Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility
for Ecological Justice Efforts***

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 59-74

To achieve ecological justice, from the Stockholm Declaration in 1972 to the Johannesburg Convention in 2002, it always contains the principle of State Responsibility towards the environment and the concept of Good Sustainable Development Goals. The absence of a Special Environmental Court has implications for the enforcement of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The formation of a special court is alluded to in article 27 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. Therefore, this research's focus is first: what is the state's responsibility to uphold environmental law; second Is there an opportunity to establish a special environmental court. This research uses normative research methods. This method is carried out by examining literary sources, namely by examining legal principles and norms. This paper aims to make the formulation of a special environmental court become a legal vacuum and a channel to get a sense of ecological justice for civil society's struggle with affected residents in cases of environmental destruction including in order to encourage the government to take responsibility for policies issued if they cause environmental damage.

Keywords: court; environment; state responsibility

Eko Noer Kristiyanto

The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 75-90

The football industry era made clubs independent and optimised their potential economic one of the main income sources for professional clubs in merchandise sale. Trademark affairs are regulated by Indonesian national law and are one of the government's duties. This paper tries to explain how the government plays a role in protecting the football club's brand rights through qualitative explanations, along with existing examples and practices. In the context of the comprehensive legal protection of assets in brands and products, registering club names and logos is the right choice for Indonesian professional football clubs. So far not all football clubs have registered trademarks with the Directorate General of Intellectual Property - Ministry of Law and Human Rights even though this step is crucial to anticipate the rapid progress in the professional football industry.

Keywords: industry; football, brands; intellectual property; legal protection

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Sujatmiko, Willy Wibowo

Urgency of Formation Regulation Gratation, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 91-108

Legal polemics regarding the granting of clemency, amnesty, abolition and, rehabilitation as in the case of Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, the Governor of Riau, Corby and, Grobmann arise because the regulations governing the granting of the prerogative of the President in the judicial sector are not appropriate with legal problems in Indonesia. For this reason, the urgency for the formulation of the Law on Clemency, Amnesty, Abolition and, Rehabilitation. This article aims to analyse the urgency of the Law's formulation on Clemency, Amnesty, Abolition and, Rehabilitation. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. Field data collection was carried out through focus group discussions with resource persons. This study concludes that the Draft Law on Clemency, Amnesty, Abolition and, Rehabilitation is urgent to form a new law for adjustment to the constitution and legal developments that prioritize the principles of human rights, as the implementation of the prerogative of the President as regulated in Article 14 Paragraphs 1 and 2. It is based on considerations of constitutional changes and the legal needs of the community, aims to facilitate the President to using his prerogatives and to ensure that the principles of accountability, the principles of public transparency, the implementation of monitoring and evaluation, and checks and balances as of the manifestation of implementing good governance. Suggestions from this research are that the Ministry of Law and Human Rights through main units such as Balitbangkumham, BPHN, Ditjen AHU and, Directorate General PP prepare supporting documents for the Draft Law on Clemency, Amnesty, Abolition and, Rehabilitation to enter into the 2022 prolegnas.

Keywords: regulation; clemency; amnesty; abolition; rehabilitation

Adis Nur Hayati

Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The Digital Economic Industry (E-Commerce) Sector in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 109-122

The increase in the number and value of e-commerce transactions in Indonesia every year has led to more opportunities for anti-competition actions in the sector concerned. This paper then examines the challenges of business competition law enforcement in Indonesia's e-commerce sector and the role of KPPU in enforcing business competition law in that sector. The type of research used in this research is normative juridical legal research with analytical descriptive typology. The results showed that the challenges of enforcing business competition law in Indonesia's e-commerce sector are related to the potential for monopolistic practices and unfair business competition in the e-commerce sector, such as digital monopoly and digital predatory, lock-in and others. Another challenge is with regard to the non- adoption of the principle of extraterritoriality in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In connection with these issues, KPPU has a supervisory role and has authority to be investigator, investigator, investigator, prosecutor, decision- maker, and consultative function in enforcing business competition law in the e-commerce sector. The advice given is that more specific arrangements regarding the e-commerce industry should also be regulated in Indonesian business competition law. Besides that, the regulation regarding the principle of extraterritoriality in Indonesian business competition law is also a necessity that must be implemented immediately.

Keywords: business competition; e-commerce; law enforcement

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Ibnu Sina Chandranegara

Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 123-140

In mid-2019-2020, Indonesia's law-making process is considered low quality due to the secret, non-transparent and hasty discussion. This condition worsens the legislative process in Indonesia and displaying tyranny of legislation. Therefore, fast-track legislation becomes an alternative idea to limit bad law-making that often repeated. This article is intended to review how fast-track legislation in various countries and measuring if fast-track legislation as alternative law-making process adopted in Indonesia. This study uses a normative legal research method, with a comparative law approach. The research was carried out by examining regulatory material and implementing fast-track legislation in several countries, such as the United Kingdom, the United States, New Zealand, France, Colombia and Ecuador to measuring probability if Indonesia needs to adopt this procedure.

Keywords: *bad law-making process; fast track legislation; legislation*

Insan Firdaus

Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners

Law Research Journal De Jure, 2021 March, Volume 21, Number 1, Page 141-160

The implementation of narcotics rehabilitation for prisoners refers to the narcotics law and the correctional law. However, the implementation of these laws has differences. According to the Narcotics Law, the determination of prisoners' narcotics rehabilitation is based on a judge's decision. According to the Correctional Law, all prisoners categorized as addicts and narcotics abusers have the same right to obtain narcotics rehabilitation. Therefore, the research problem is how to harmonize the Narcotics Law and the Correctional Law related to the rehabilitation of narcotics for prisoners in prison. The research objective was to determine the alignment of the implementation of narcotics rehabilitation for prisoners by the Narcotics Law and the Correctional Law's perspective. The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. The results showed that the harmonization between the Narcotics Law and the Correctional Law could be done using an extensive interpretation of the law. Applying the lex specialist principle and the similarity of philosophical, sociological and juridical foundations. Thus, it is necessary to regulate narcotics rehabilitation in the draft Correctional Law and harmonize it with the Narcotics Law. There is a need for standards for the implementation of narcotics rehabilitation for prisoners.

Keywords: *harmonization; narcotics rehabilitation; prisoners*

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Edward Omar Sharif Hiariej (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 1-12

Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivat dari asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas *lex specialis systematis*. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis*. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait asas *lex specialis derogat legi generali* dan hukum pidana pajak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* karena adresat-nya sangat khusus yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formil dalam hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP dan KUHPA. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: Perlu melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan dengan mengingat hukum pidana pajak adalah ius singular sebagai hukum administrasi yang diberi sanksi pidana

Kata kunci: *lex specialis*; hukum pidana pajak

Erwin Ubwarin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Patty, Anna Maria Salamor (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon)

Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non- Alam Akibat SARS-COV-2

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 13-22

Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (*immunity*) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang membahas tentang kekebalan hukum, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu lambatnya penyerapan anggaran dana bencana dan penanganan lambat adalah prosedur administrasi yang panjang dan pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena ancaman hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan, dan sifat kekebalan hukumnya tidak absolut sehingga pengambil kebijakan tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena harus ada itikad baik dalam mengambil kebijakan atau perbuatan dalam penanganan Covid-19. Kesimpulannya kekebalan hukum dalam penanganan perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan namun harus ada itikad baik dalam pengambilan kebijakan atau perbuatan yang dilakukan. Saran perlu peraturan bahwa undang-undang yang dapat menjelaskan maksud dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Kata kunci: kekebalan hukum; pidana; covid-19

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Marulak Pardede (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI) Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 23-44

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semakin banyak varian virus Corona baru yang dilaporkan di dunia, memiliki potensi lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Namun demikian WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi. Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif terbanyak. Untuk penanggulangan wabah ini, program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Vaksin wajib, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pokok Permasalahan penelitian: bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan covid-19; serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19? Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan yuridis-normatif; Teknik pengumpulan data dilakukan cara: studi kepustakaan. Teknik analisis data: analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, dimungkinkan digugat, karena disharmonisasi dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen. Untuk menanggulanginya, perlu dilakukan upaya: penyesuaian perundang-undangan; Sosialisasi, transparansi atas kegunaan dan resiko vaksinasi covid-19.

Kata kunci: hukum kekarantinaan kesehatan; covid-19; konsumen

Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di saat COVID-19

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 45-58

Eksistensi teknologi yang berkembang begitu pesat menandakan adanya pergerakan menuju era digital. Dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan. Dalam teknologi informasi dihasilkan berbagai macam produk yang menunjang kegiatan manusia. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan proteksi secara yuridis, salah satunya hak kekayaan intelektual yang harus terjamin. Terkait dengan Kekayaan Intelektual, Indonesia sebenarnya sudah sangat mengakui keberadaannya supaya dijaga dan dilindungi. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis yaitu dilandaskan atas analisis peraturan perundang-undangan dan pengkajian literatur yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sumber data sekunder berupa tiga bahan hukum. Hasil penelitian ini berupa edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi tiap elemen intelektual penghasil inovasi, utamanya di masa pandemi dan pemahaman terkait bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada warga negaranya, yang diakomodir dengan dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi, penyesuaian regulasi dan pemberian atensi lebih terhadap inventor. Dengan adanya sistem pendaftaran kekayaan intelektual berbentuk daring sebagai upaya pemaksimalan layanan bagi masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi.

Kata kunci: Covid-19; Kekayaan Intelektual; Pelindungan Hukum; Teknologi Informasi

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Muhar Junef, Moh. Husain (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 59-74

Untuk mewujudkan keadilan ekologis, dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Conveni Johanesburg tahun 2002 selalu memuat prinsip tanggung jawab negara (*State Responsibility*) terhadap lingkungan dan konsep *Good Sustainable Development Goals*. Ketidadaan Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan norma-norma hukum. Tulisan ini bertujuan agar pembentukan pengadilan khusus lingkungan menjadi pengisian kekosongan hukum dan saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis atas perjuangan masyarakat sipil bersama warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan, termasuk dalam rangka mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan jika mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: pengadilan; lingkungan; tanggung jawab negara

Eko Noer Kristiyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)

Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 75-90

Era industri sepak bola membuat klub harus mandiri dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Salah satu sumber pendapatan utama klub profesional adalah penjualan merchandise dan. urusan merek diatur oleh hukum nasional Indonesia dan merupakan salah satu tugas pemerintah, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam perlindungan hak merek klub sepak bola melalui penjelasan kualitatif beserta contoh dan praktik yang ada. Dalam konteks perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap aset berupa merek serta produk, maka mendaftarkan nama klub beserta logo menjadi pilihan tepat bagi klub sepak bola profesional Indonesia, hingga saat ini belum seluruh klub sepak bola mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM. Padahal langkah tersebut sangat penting untuk mengantisipasi kemajuan pesat di industri sepak bola profesional.

Kata kunci: industri; sepak bola; merek; kekayaan intelektual; perlindungan hukum

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Sujatmiko, Willy Wibowo (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 91-108

Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial tersebut sudah tidak sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia. Untuk itu bagaimanakah urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan *focus group discussion* dengan narasumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bersifat urgen untuk segera di bentuk Undang-undang baru guna penyesuaian terhadap konstitusi dan perkembangan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sebagai implementasi hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan perubahan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya serta untuk memastikan bahwa asas akuntabilitas, asas transparansi publik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta *check and balances* sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*. Saran dari penelitian ini agar Kementerian Hukum dan HAM melalui unit utama seperti Balitbangkumham, BPHN, Ditjen AHU dan Ditjen PP mempersiapkan dokumen pendukung Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi agar masuk ke dalam prolegnas Tahun 2022.

Kata kunci: peraturan; grasi; amnesti; abolisi; rehabilitasi

Adis Nur Hayati (Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia)

Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor Industri Ekonomi Digital (E-Commerce) di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 109-122

Peningkatan jumlah dan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia setiap tahunnya telah mendorong semakin terbukanya peluang terjadinya tindakan anti persaingan usaha pada sektor bersangkutan. Tulisan ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana kondisi tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce* di Indonesia serta bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce* di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor *e-commerce* seperti monopoli digital, *predatory digital*, *lock in* dan lainnya. Tantangan lainnya ialah berkenaan dengan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, KPPU sendiri memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce*. Saran yang disampaikan ialah pengaturan lebih khusus mengenai industri *e-commerce* seyogyanya juga diatur dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Di samping itu, pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha Indonesia juga menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan.

Kata kunci: persaingan usaha; e-commerce; penegakan hukum

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ibnu Sina Chandranegara (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta)

Pengadopsian Mekanisme *Fast-Track Legislation* dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 123-140

Pembentukan undang-undang pada medio 2019-2020 kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. Kondisi ini memperburuk proses legislasi di Indonesia. Mekanisme *fast-track legislation* yang tidak dimiliki di Indonesia namun seolah-olah telah dipraktikkan, mengakibatkan adanya asumsi tirani legislasi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu *fast-track legislation* menjadi alternatif gagasan untuk membatasi kekuasaan praktik pembentukan undang-undang yang buruk tidak terulang kembali. Artikel ini dimaksudkan untuk meninjau bagaimana pengaturan dan praktik *fast-track legislation* di berbagai negara serta menganalisis proyeksi pengadopsian *fast-track legislation* ke dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia dengan cara menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. penelitian dilakukan dengan meneliti materi pengaturan dan praktik pelaksanaan *fast-track legislation* di beberapa negara yang memilikinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Perancis, Kolombia, dan Ekuador untuk ditemukan hal yang dapat diadopsi dan hal yang perlu dihindari apabila kemudian diadopsi ke dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Kata kunci: pembentukan undang-undang yang buruk; *fast track legislation*; perundang-undangan

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)

Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1, Maret 2021, Halaman 141-160

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasarakatan mengacu kepada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasarakatan, namun dalam pelaksanaannya kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan. Menurut Undang Undang Narkotika penentuan rehabilitasi narkotika bagi narapidana berdasarkan putusan hakim sedangkan menurut Undang-Undang Pemasarakatan semua narapidana yang dikategorikan pecandu dan penyalahguna narkotika mempunyai hak yang sama untuk mengikuti rehabilitasi narkotika. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasarakatan tentang rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasarakatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelarasan pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi narapidana dari perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian didapatkan harmonisasi antara undang-undang narkotika dan undang pemasarakatan dapat dilakukan dengan cara penafsiran undang-undang secara ekstensif, penerapan asas *lex spesialis* dan kesamaan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Untuk itu perlu dimuat aturan rehabilitasi narkotika dalam rancangan Undang Undang Pemasarakatan dan diharmonisasi dengan Undang Undang Narkotika, serta perlu dibuatnya standar penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasarakatan.

Kata kunci: harmonisasi; rehabilitasi narkotika; warga binaan pemasarakatan